

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat berperan penting terhadap keberlangsungan pembangunan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat bersifat wajib sehingga membuat pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk menindak lanjuti wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pembangunan negara maupun membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dengan tujuan akhir berupa kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan penuh terhadap wajib pajak untuk memungut serta mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh DJP ialah Pajak Pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Ekspor/Impor, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dimana pajak tersebut dipungut langsung oleh pemerintah pusat kemudian akan dipergunakan sebagai bantuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang mengalami adanya pertambahan nilai. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2000. Pola konsumsi masyarakat serta perkembangan transaksi bisnis sangat mempengaruhi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu jumlah harga jual, nilai impor/ekspor, serta penggantian merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi dasar dari pengenaan PPN. Untuk Barang Kena Pajak di dalam Wilayah Pabean akan dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Adanya pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen) bukan berarti terdapat pembebasan dari pengenaan PPN. Sedangkan untuk tarif PPN di Indonesia sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dan dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) yang dimana perubahan tarifnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat 2 (dua) jenis istilah yang sering digunakan yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib untuk dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak. Sedangkan Pajak Masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimana seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikarenakan adanya perolehan barang atau jasa yang kena pajak. Apabila perolehan pajak masukan lebih besar daripada perolehan pajak keluaran, maka wajib pajak mengalami lebih bayar sedangkan apabila perolehan pajak masukan lebih kecil daripada perolehan pajak keluaran maka wajib pajak mengalami kurang bayar.

Terdapatnya lebih bayar yang diperoleh oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut berhak untuk merestitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Didalam Undang-Undang Perpajakan telah disebutkan bahwa wajib pajak memiliki hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimana salah satu dari hak tersebut ialah hak untuk melakukan restitusi

atau kompensasi. Restitusi pajak dapat dilakukan terhadap semua jenis pajak selama Masa Pajak tersebut.

Timbulnya kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan oleh adanya pajak yang telah dibayar melalui setoran bulanan atau pemotongan melalui pihak ketiga yang lebih besar dibandingkan pajak terhutang yang harus dibayar di dalam SPT, terdapatnya PPN masukan yang lebih besar daripada PPN keluaran dalam satu periode dan terdapatnya pungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang tidak terhutang PPN.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo terdapat cukup banyak pelaksanaan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi dikarenakan KPP Madya Sidoarjo berfokus dalam pengurusan pajak atas jenis pajak tidak langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya proses restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu bagian dari jenis pajak tidak langsung yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis ingin mengetahui dan mempelajari lebih jauh mengenai restitusi atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh fiskus. Atas dasar rasa keingintahuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap restitusi PPN sebagai usulan tugas akhir yang berjudul “**Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Apa kendala serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan hasil akhir dan mencapai tujuan penelitian dari laporan penelitian tersebut seperti yang diharapkan, maka penulis memfokuskan penelitian pada prosedur pelaksanaan pengajuan restitusi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kendala yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta solusi dari kendala tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo

Sebagai masukan atas pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai media untuk pengaplikasian materi-materi yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya Ekonomi.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana penambah wawasan serta penunjang penelitian lebih lanjut dari kekurang sempurnaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

